

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur Buku

- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI. 2008. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Tangerang: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI.
- Djubaedillah, Djumhana Muhammad. 2003. *Hak Milik Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata*. Bandung PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Purba, Achmad Zen Umar. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trip's*. Bandung: PT. Alumni
- Purwaningsih, Endang. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Simatupang, Richard Burton. 2007. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Saidin, Ok. 2006. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Subroto, Muhammad Ahkam. 2008. *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*. Jakarta: Indeks.

Subekti, R. 2005. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Subroto, Muhammad Ahkam. 2008. *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*. Jakarta: Indeks.

Sudarsono. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Supramono, Gatot. 2008. *Menyelesaikan Sengketa Merek menurut Hukum Indonesia*. Pekanbaru: Rineka Cipta.

Sutedi, Adrian. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika.

Tutik, Titik Triwulan. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang–Undang Republik Indonesia. Nomor 15 Tahun 2001 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564 Tentang Merek.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 23 Tahun 1993. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 81. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3490 Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Barang atau Jasa bagi Pendaftaran Merek.